

Badan Pusat Statistik Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information and Innovation (SCBTII 2020) Proceeding's topic deals with ``Synergizing Management, Technology and Innovation in Generating Sustainable and Competitive Business Growth``. This proceeding offers valuable knowledge on how research can be applied to support the government by introducing a policy of economic transformation in solving various challenges and driving the business sector to gain the ability to create sustainable competitive advantages, which will lead to sustainable, competitive and quality growth. The subjects in this Proceeding are classified into four tracks: Strategy, Entrepreneurship, Economics; Digital-Based Management; Finance and Corporate Governance; and Accounting. These valuable researches inside this proceeding can help academicians, professionals, entrepreneurs, researchers, learners, and other related groups from around the world who have special interest in theories and practices in the field of digital economy for global competitiveness.

Definition concept of statistical operational standard used by technical working unit in gathering data of mining, energy, construction, and processing industry in Indonesia.

Betapa indahny menjadi pengusaha! Bebas menentukan pilihan usaha yang dijalankan, memiliki waktu yang lebih fleksibel, tidak diperintah orang lain, dan tentunya ikut membantu orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Di samping itu, peluang ekonomi global sudah kian terbuka untuk Indonesia. Artinya, peluang pasar menjadi jauh lebih luas. Tentunya, peluang sukses untuk pengusaha juga kian bertambah. Namun, sebagai calon pengusaha atau pengusaha pemula, Anda mungkin bertanya-tanya, apa bedanya badan usaha milik perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, dan PT, juga koperasi dan yayasan? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika ingin membuka salah satu badan usaha tersebut? Berkas-berkas apa yang harus dipersiapkan dan berapa biayanya? Berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka masing-masih badan usaha ini? Lalu, usaha apa yang sesuai dan menarik? Setelah semua itu, bagaimana cara menjalankan perusahaan? Buku terbitan VisiMedia Pustaka ini membimbing Anda sukses memulai usaha. Dalam buku ini dipaparkan (1) pemilihan badan usaha yang sesuai, (2) langkah-langkah, paparan estimasi biaya, dan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pendirian badan usaha, (3) berbagai jenis usaha yang menarik, (4) cara penentuan modal dan menyusun proposal usaha, hingga (5) bagaimana menjalankan perusahaan. Setelah membaca buku ini, Anda akan yakin bahwa MEMULAI USAHA ITU GAMPANG. ANALISIS DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT PADA SEKTOR BISNIS ONLINE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI

National standard classification of businesses in Indonesia; code draft 3 digits. Classification of manufacturing and non-manufacturing industries in Indonesia. Prakata Dengan mengucapkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Swt., akhirnya kami dapat

menyelesaikan buku ajar berjudul Pengantar Ekonomika Wilayah: Pendekatan Analisis Praktis. Buku ini lahir berkat kerja sama tim pengajar mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Kota Program Studi S-I Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung. Buku ini lebih menekankan pada aspek perencanaan wilayah dengan menggunakan analisis praktis yang ditujukan bagi para pemula dan mahasiswa tingkat sarjana yang ingin menganalisis wilayah dengan menggunakan analisis yang praktis. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ing. Widjaja Martokusumo selaku Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Institut Teknologi Bandung yang telah memberikan tugas dan dorongan untuk penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Untuk itu, kritik dan saran akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan buku ini selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada siapa saja yang membacanya. Amin. Bandung, Agustus 2017 Tim Penulis

Indonesia merupakan negara yang tak mau ketinggalan trend, Indonesia memiliki aturan hukum berkenaan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) walaupun masih bersifat sumir. Dikemukakan demikian karena baik Undang-undang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, tidak mengatur mengenai apa yang dimaksudkan dengan TJSL. Mengingat belum terdapatnya undang-undang tentang badan hukum, undang-undang khusus mengenai hal itu maka selama ini pihak-pihak yang berkepentingan tampak sudah cukup puas dengan adanya undang-undang lain yang mengandung norma yang dikait-kaitkan – diinterpretasikan – dapat mengukuhkan status entitas mereka sebagai badan hukum, kemudahan mendirikan bentuk badan hukum perusahaan itu juga dapat disaksikan dengan adanya ketentuan Pasal 34 ayat (1) bahwa penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan(ayat 2). Dalam buku membahas pemahaman tentang pokok - pokok materi yang diawali dengan ringkas pengertian kosep hukum bisnis.

Dalam buku ini dijelaskan beberapa hal terutama mengenai kondisi umum perkembangan dan pengembangan industri kuliner di Indonesia yang dijelaskan di dalam setiap bab dan sub-sub topiknya. Bab satu dimulai dengan penjelasan tentang perkembangan kuliner. Bab kedua membahas kondisi umum pengembangan kuliner. Bab ketiga membahas tentang ruang lingkup, model bisnis dan pengembangan industri kuliner. Bab keempat membahas seluk-beluk bisnis kuliner. Bab kelima membahas seputar kuliner tradisional khas wilayah (daerah). Bab keenam diakhiri dengan ragam resep dan cara pengolahan kuliner tradisional khas Sulawesi. Buku ini diterbitkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk beberapa mata kuliah karena menggabungkan beberapa aspek di seputar kuliner, mulai dari aspek historis, aspek perkembangan bisnis kuliner, aspek pengembangan kuliner tradisional, hingga mengenalkan resep-resep yang digunakan dan cara pengolahan makanan tradisional khas Sulawesi. Buku ini juga bisa digunakan sebagai buku referensi yang dapat menuntun para pelaku dan penikmat kuliner dalam memahami, memperkaya wawasan terhadap perkembangan dan pengembangan kuliner tradisional. Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional Khas Sulawesi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah menambah wawasan mengenai bahan baku perikanan. Keanekaragaman bahan baku perikanan yang tinggi, membuat buku ini harus dibatasi pada komoditas perikanan hewani, walaupun belum semuanya tercakup pada bahasan buku ini.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai: Bab 1 Pengantar Bahan Baku Perikanan Bab 2 Karakteristik Bahan Baku Perikanan Bab 3 Ikan Nila Bab 4 Ikan Lele Dan Patin Bab 5 Ikan Tuna Dan Tenggiri Bab 6 Udang Bab 7 Cumi-Cumi Dan Sotong Bab 8 Jellyfish Bab 9 Teripang/Timun Laut Bab 10 Keekerangan Bab 11 Sidat Bab 12 Belut

Pengertian sederhana tentang Ekonomi Moneter merujuk pada bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai sifat, fungsi, serta pengaruh uang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hematnya, ekonomi moneter berbicara mengenai bagaimana “uang” itu bekerja. Namun, secara substansial masih banyak sekali yang dipelajari dalam ekonomi moneter, misalnya bagaimana pasar uang berjalan, tingkat bunga, inflasi, kebijakan moneter, permasalahan dalam kebijakan moneter hingga sistem moneter internasional dan persoalan krisis keuangan. Kemudian, muncul pertanyaan: Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi moneter? Jawaban yang hampir ideal atas pertanyaan tersebut adalah kita dapat mengetahui secara mendalam mengenai jalannya mekanisme pasar uang, pengaruh tingkat bunga dalam perekonomian, bagaimana negara mengatur persoalan inflasi, kebijakan negara dalam membuat kebijakan moneter, serta cara kerja sistem moneter internasional hingga mempelajari krisis keuangan yang sempat melanda Indonesia. Selain itu, kita juga dapat menganalisis secara tajam beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan kebijakan moneter terhadap perekonomian negara. Pada akhirnya, dengan mempelajari ekonomi moneter akan menambah khazanah pengetahuan sehingga diharapkan kita menjadi lebih kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya kebijakan pengaturan uang dan perbankan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pengetahuan tentang ekonomi moneter juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil sebuah kebijaksanaan melalui teori ekonomi moneter yang telah dipelajari sehingga kebijakan tersebut menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang muncul pada paruh kedua abad ke-19 sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis. Perubahan sosial tersebut menimbulkan kekacauan tatanan sosial karena memudarnya otoritas agama dan otoritas politik. Sosiologi diharapkan oleh pendirinya, yaitu August Comte dan Emile Durkheim, untuk bisa membantu memperbaiki tatanan sosial yang ada tanpa mendasarkan diri pada basis legitimasi yang lama, yaitu agama dan tradisi. Tatanan sosial yang baru harus dibangun pada basis legitimasi yang baru pula, yaitu ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan diharapkan bisa membantu menemukan basis legitimasi tersebut dengan memberikan sumbangan teori-teori yang dibangun berdasarkan fakta-fakta empiris. Buku ini bisa ditulis berkat dukungan dari Dekan dan Wakil Dekan I FISIP, Universitas Sam Ratulangi, Dr. Novie R. Pih dan Dr. Alfon Kimbal. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan dan Wakil Dekan II. Dukungan dari para mahasiswa pada saat kuliah juga memungkinkan ditulisnya buku ini. Beberapa mahasiswa sosiologi telah membaca dan mengoreksi kata-kata dan kalimat-kalimat yang ada, apakah mudah dimengerti atau tidak. Hal ini penting karena buku ini ditujukan kepada mereka para mahasiswa. Mereka adalah x Marviel Tarru, Erike Tambani, Chelvin Dante, Elsaday Tiwa, Samuel Worotikan, Angelina Ngantung, Armylia Malimbe, dan Meity Marhaba.

Buku ini Membahas: • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mencakup: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bab III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Perencanaan Pengadaan Bab V Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Bab VI Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Bab VII Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VIII Pengadaan Khusus Bab IX Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan

Pengadaan Berkelanjutan Bab X Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Bab XI Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bab XII Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup • Peraturan LKPP Nomor 7 hingga Nomor 19 Tahun 2018 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa #PeraturanPresiden #Perpres #PeraturanPresidenRI #PeraturanPresidenRepublikIndonesia #PerpresNomor16Tahun2018 #PerpresRINomor16Tahun2018 #PengadaanBarangJasaPemerintah #BarangJasaPemerintah #PengadaanBarangJasa #PeraturanLKPP #PeraturanLKPPTerbaru #13PeraturanLKPPterbaru #DokumenResmi #DokumenResmiNegara #GovernmentRegulation #Law #Hukum #Peraturan #UndangUndang #PeraturanPemerintah #EtikaPengadaanBarangJasa #PelakuPengadaanBarangJasa #PerencanaanPengadaan #KebijakanPengadaan #KebijakanPengadaanBarangJasa #PersiapanPengadaanBarangJasa #PengadaanKhusus #UsahaKecil #ProdukDalamNegeri #Perusahaan #PerusahaanBesar #SumberDayaManusia #Pengawasan #Pengaduan #Sanksi #PelayananHukum #Presiden #PresidenJokoWidodo #PresidenJokowi #Visimedia Buku persembahan penerbit VisiMedia

Istilah disruptif mulai populer di Indonesia sekitar 5 tahun terakhir saat munculnya moda transportasi online: Gojek. Tahun 2017 terjadi demo yang dilakukan para pengemudi ojek pangkalan di 10 kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Bogor, dan Malang). Gojek adalah salah satu contoh inovasi disruptif. Inovasi yang mengganggu ojek pangkalan karena

pelanggan ojek pangkalan beralih ke jasa Gojek. Dengan berbagai keunggulannya melalui inovasi, yaitu aplikasi di ponsel Android dan iOS, Gojek mampu menarik pengguna baru yang sebelumnya adalah bukan pengguna moda transportasi roda dua. Inovasi disruptif yang terjadi pada transportasi, khususnya roda dua terjadi secara massal dan berlangsung cepat, yang disebut inovasi disruptif high-end atau new market disruption. Namun, inovasi disruptif ada yang bersifat inovasi disruptif low-end, prosesnya relatif lama, tidak menciptakan pasar baru, hanyalah model bisnis berbiaya rendah yang tumbuh dengan menarik pelanggan perusahaan yang sudah mapan. Produk pangan, khususnya pangan fungsional di Indonesia adalah salah satu contoh inovasi disruptif low-end. Pangan fungsional sangat penting bagi kesehatan manusia dan dapat diproduksi dengan biaya murah di Indonesia. Buku ini lebih banyak membahas inovasi disruptif low-end yang dapat dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memproduksi bahan pangan lokal. Tujuannya untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa inovasi disruptif tidak selalu dilakukan oleh usaha yang bermodal besar dan berbasis teknologi atau usaha rintisan (start-up). Buku ini tidak hanya membahas teori, tetapi disertai hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis selama 5 tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir penelitian menggunakan pendekatan pendamping pada UKM/IKM sehingga argumentasi yang disampaikan berdasarkan fakta empiris. Selain penelitian, para peneliti juga menindaklanjuti dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan workshop. Prinsip triple helix (akademisi, pemerintah, dan pebisnis), bahkan quadruple helix (triple helix ditambah komunitas) diterapkan selama proses penelitian sampai dengan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini layak dan cocok dibaca oleh berbagai kalangan dalam triple helix dan quadruple helix. Bagi akademisi (dosen, mahasiswa, dan peneliti), hasil penelitian yang disajikan di buku ini bisa membuka peluang penelitian untuk jenis bisnis selain industri makanan atau penelitian terkait topik-topik yang disajikan di bab terakhir (agenda ke depan). Bagi pengusaha, buku ini menyajikan informasi tentang karakteristik inovasi disruptif sehingga menyediakan alternatif pilihan jenis inovasi disruptif yang sesuai dengan kondisi usaha. Selain itu, disajikan pula potensi bisnis pada industri pangan fungsional. Model peningkatan daya saing berkelanjutan pada UKM/IKM berbasis inovasi disruptif sangat cocok bagi pemerintah daerah karena UKM/IKM adalah basis ekonomi daerah maupun nasional.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian empiris dan kajian pustaka dari penelitian yang memiliki topik sejenis. Beberapa bagian dari buku ini menjelaskan tentang perkembangan industri kreatif yang ada di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan industri kreatif tersebut. Penulis melakukan penelitian mengenai industri kreatif karena pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya terus mengalami pergeseran, mulai dari basis pertanian, industrialisasi, lalu menuju pada ekonomi yang berbasis teknologi informasi (IT) yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif dan sangat diperlukan untuk bersaing dalam perekonomian secara global.

Modal asing, langsung atau tidak, merupakan salah satu sumber daya yang aktif memutar roda perekonomian nasional. Dengan berbagai aspek ikutan yang dibawanya, pemerintah menyusun berbagai aturan dan perundang-undangan sebagai alat untuk mengatur dan menjaga agar aktivitas ekonomi tersebut tetap memberi kemaslahatan

sebesar-besarnya bagi bangsa. Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia
Development of creative economy in Indonesia.

Dalam sejarah dunia, Revolusi Industri terjadi karena dipicu oleh inovasi baru yang sanggup mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Dapat dipastikan bahwa mereka yang menolak berinovasi akan tertinggal jauh, apalagi dalam era industri 4.0 seperti sekarang. Inovasi di bidang teknologi telah menguasai sektor apa pun dan ada di mana-mana. Bahkan, dari daftar lima perusahaan terkaya di dunia, hanya Coca-Cola Company yang bukan merupakan perusahaan berbasis teknologi; sisanya adalah Apple, Google, Microsoft, dan Facebook. Persaingan dunia bisnis menjadi semakin kompleks. Karenanya, inovasi mutlak diperlukan sebagai salah satu kunci sukses untuk memenangkan persaingan. Buku ini hadir guna membantu para pelaku usaha untuk mengetahui hakikat inovasi. Pembaca akan diajak mempelajari serta memahami esensi atau substansi dasar dari fenomena inovasi yang disusun berdasarkan riset ilmiah/data sekunder dari sumber yang reliable serta berfokus pada esensi sumber inovasi, exploring various forms of innovation, dan telah dipublikasikan di sumber yang kredibel. Inovasi tak hanya bisa diterapkan pada satu sektor, tapi juga bisa diterapkan pada berbagai sektor alias inovasi lintas sektor. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber ide atau inspirasi untuk berinovasi dalam berbagai konteks dan kasus.

Buku ini didisusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta turunannya, antara lain Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2019 , dan khusus untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.. Memahami Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pemahaman atas pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitasnya. PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Saat ini Perseroan Terbatas (Naamlooze Vennotschap atau Limited Liability Company) merupakan institusi ekonomi sekaligus bentuk wahana aktivitas ekonomi yang sering dipilih oleh pelaku usaha, jika dibanding dengan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Namun bentuk badan usaha ini memiliki kompleksitasnya sendiri. Buku ini hadir untuk menunjukkan kerumitan tersebut.

Statistics of financial balance for fiscal year 2010 in Indonesia.

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan

komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat-syarat dari pengesahan itu, yaitu pemohon atau notaris harus memasukkan dokumen kelengkapannya secara digital. Begitu juga pengesahannya, dilakukan secara digital dan notaris tinggal mencetak pengesahan tersebut. Buku ini terdiri atas 9 Bab, yang meliputi: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Konsep Teoretis dan Landasan Filosofis Teknik Pembuatan Akta secara Digital Bab 3 Konsep Teoretis, Penggolongan dan Teori Badan Usaha Bab 4 Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Bab 5 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bab 6 Akta Pendirian Koperasi Bab 7 Akta Pendirian Yayasan Bab 8 Akta Pendirian Persekutuan Firma Bab 9 Akta Pendirian Persekutuan Komanditer Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa S-2 Program Studi Magister Kenotariatan, Notaris, pengurus dan anggota badan usaha, dunia perbankan, pelaku usaha, dan lainnya.

Meningkatnya pendapatan masyarakat suatu perekonomian akan disertai oleh perubahan-perubahan yang terkait dengan fungsi ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah Transformasi Perekonomian yang dapat dikelompokkan ke dalam proses akumulasi, proses alokasi, dan proses distribusi demografi dan pendapatan. Banyak buku yang mencoba menjelaskan Transformasi Perekonomian Indonesia tetapi biasanya lebih menekankan analisis pergerakan data saja tanpa terlebih dahulu memberikan pemahaman teoritis. Karena itu, buku ini mencoba memberikan kerangka berpikir dengan menggunakan teori-teori ekonomi pembangunan sebelum menjelaskan pergerakan data. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami argumen dasar di balik pergerakan data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa buku ini mencoba untuk menjelaskan kerangka konseptual proses-proses tersebut, sekaligus mengungkapkan Transformasi Perekonomian Indonesia berdasarkan data yang tersedia daring (online) dalam jangka panjang. Penjelasan Transformasi Perekonomian Indonesia dalam buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah mencoba memperlihatkan dengan data jangka panjang bagaimana Transformasi Perekonomian Indonesia terjadi secara umum pada semua kelompok indikator dalam proses-proses tersebut secara agregat. Bagian kedua adalah memilih beberapa indikator yang penting dari proses akumulasi, alokasi, dan distribusi untuk dilihat lebih dalam transformasinya berdasarkan data yang berhasil didapatkan penulis saat penulisan buku ini. Buku ini berguna bagi yang ingin memahami perekonomian Indonesia untuk pemula, khususnya mahasiswa, perencana tingkat dasar, dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana perubahan yang terjadi pada perekonomian dalam jangka panjang. Dalam hal ini adalah memahami Transformasi Perekonomian Indonesia yang juga dapat diaplikasikan konsepnya untuk perekonomian negara lainnya bahkan pada level provinsi atau kabupaten/kota. Meningkatnya pendapatan masyarakat suatu perekonomian akan disertai oleh perubahan-perubahan yang terkait dengan fungsi ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah Transformasi Perekonomian yang dapat dikelompokkan ke dalam proses akumulasi, proses alokasi, dan proses distribusi demografi dan pendapatan. Banyak buku yang mencoba menjelaskan Transformasi Perekonomian Indonesia tetapi biasanya lebih menekankan analisis pergerakan data saja tanpa terlebih dahulu memberikan pemahaman teoritis. Karena itu, buku ini mencoba memberikan kerangka berpikir dengan menggunakan teori-teori ekonomi pembangunan sebelum menjelaskan pergerakan data. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami argumen dasar di balik pergerakan data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa buku ini mencoba untuk menjelaskan kerangka konseptual proses-proses tersebut, sekaligus mengungkapkan Transformasi Perekonomian Indonesia berdasarkan data yang tersedia daring (online) dalam jangka panjang. Penjelasan Transformasi Perekonomian Indonesia dalam buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah mencoba memperlihatkan dengan data jangka panjang bagaimana Transformasi Perekonomian Indonesia terjadi secara umum pada semua kelompok indikator dalam proses-

proses tersebut secara agregat. Bagian kedua adalah memilih beberapa indikator yang penting dari proses akumulasi, alokasi, dan distribusi untuk dilihat lebih dalam transformasinya berdasarkan data yang berhasil didapatkan penulis saat penulisan buku ini. Buku ini berguna bagi yang ingin memahami perekonomian Indonesia untuk pemula, khususnya mahasiswa, perencana tingkat dasar, dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana perubahan yang terjadi pada perekonomian dalam jangka panjang. Dalam hal ini adalah memahami Transformasi Perekonomian Indonesia yang juga dapat diaplikasikan konsepnya untuk perekonomian negara lainnya bahkan pada level provinsi atau kabupaten/kota. Data and information on commuter; results of the 2005 intercensal population survey in Indonesia.

BUKU ini merupakan hasil penelitian dengan latar belakang masalah bahwa pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pekerja di bidang kepariwisataan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang termasuk kedalam salah satu pihak dalam Hubungan Industrial Pancasila, selain pihak pengusaha dan pemerintah. Ketiga pihak ini memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional pekerja di bidang kepariwisataan tersebut adalah penetapan ketentuan upah minimum yang diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan dalam Permenaker No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang telah dirubah dengan dengan Permenakertrans No. 7 Th. 2013 tentang Upah Minimum. Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diterapkan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan di Bali Sektor ekonomi kreatif menjadi tumpuan dalam perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, karena di nilai mampu untuk bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan dan mengutamakan peranan kekayaan intelektual. Ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan menciptakan nilai tambah ekonomis yang berdaya kreasi dengan berbasis pada ide, keterampilan dan bakat individu. Produk ekonomi kreatif berkembang tidak hanya terbatas pada barang dan jasa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pada produk-produk seni budaya dan usaha kerajinan (seperti seni pertunjukkan, seni lukis, seni patung, seni tari, seni suara, seni desain, dan kreasi lainnya). Produk tersebut sangat dinamis serta bernilai ekonomi dan komersial. Keterkaitan dalam membahas konsep dan implementasi terkait ekonomi kreatif secara komprehensif, maka buku ini disusun menjadi 12 Bab yaitu: Konsep dasar ekonomi kreatif Sejarah perkembangan ekonomi kreatif Konsep dan konteks kreativitas dan keinovasian Pemikiran-pemikiran kelas kreatif Konsep dan inisiasi pengembangan kota kreatif Sistem klasifikasi industri kreatif di lihat dari berbagai macam model Konsep keterkaitan antara industri kreatif dan ekonomi kreatif Teori dan konsep aktor penggerak ekonomi kreatif Potensi dan pangsa pasar industri kreatif Modal dasar dan pilar ekonomi kreatif Pola pikir kreatif di masa depan (sumber daya kreatif) Ekonomi kreatif di Era Revolusi Industri 4.0

[Copyright: 3120fdbf10ed8331de21ed9747c6ce51](https://www.pdfdrive.com/bookmark-file-pdf-badan-pusat-statistik-klasifikasi-baku-lapangan-usaha)